

---

## **TRANSPARANSI ANGGARAN SEBAGAI PILAR AKUNTABILITAS KEUANGAN LEMBAGA SYARIAH DALAM MERESPONS KETIDAKPASTIAN GLOBAL**

**<sup>1</sup>Ajeng Saeful Putri, <sup>2</sup>Wulan Siti Nurjanah**

<sup>1,2</sup>*UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

Email: [ajeeengsp@gmail.com](mailto:ajeeengsp@gmail.com), [sitiwsn@gmail.com](mailto:sitiwsn@gmail.com)

### *Abstract*

This study aims to explore how budget transparency serves as a foundational element in ensuring financial accountability within Islamic financial institutions, especially in the face of increasing global uncertainty. By applying a literature review method, the study investigates the connection between transparency, sharia-based accountability, and institutional resilience. The findings indicate that transparency not only facilitates public oversight and strengthens trust among stakeholders, but also supports ethical governance rooted in Islamic principles such as *amanah* and *'adalah*. Furthermore, budget transparency enables adaptive financial planning and helps mitigate risks during economic shocks. The role of sharia accounting standards—particularly PSAK No.101—and the use of digital technology also prove instrumental in enhancing openness and accountability. This study offers practical insights for Islamic financial institutions and policymakers seeking to maintain integrity and agility amid global volatility.

**Keywords:** Budget Transparency, Financial Accountability, Islamic Financial Institutions, Sharia Principles, Global Uncertainty.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana transparansi anggaran berperan sebagai elemen dasar dalam menjamin akuntabilitas keuangan lembaga keuangan syariah, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian global yang kian meningkat. Dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menelusuri keterkaitan antara keterbukaan informasi, prinsip akuntabilitas berbasis syariah, dan ketahanan kelembagaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya mendorong pengawasan publik dan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, tetapi juga mendukung tata kelola etis yang berakar pada nilai-nilai Islam seperti *amanah* dan *'adalah*. Selain itu, transparansi anggaran memungkinkan perencanaan keuangan yang adaptif serta membantu mengantisipasi risiko di tengah gejolak ekonomi. Peran standar akuntansi syariah—terutama PSAK No.101—dan pemanfaatan teknologi digital juga terbukti signifikan dalam memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas. Penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi lembaga keuangan syariah dan pembuat kebijakan untuk menjaga integritas dan kelincahan di tengah ketidakpastian global.

**Kata Kunci:** Transparansi Anggaran, Akuntabilitas Keuangan, Lembaga Keuangan Syariah, Prinsip Syariah, Ketidakpastian Global.

## PENDAHULUAN

Ketidakpastian global yang semakin kompleks—seperti krisis ekonomi, disrupti teknologi, fluktuasi geopolitik, hingga perubahan iklim—telah menimbulkan tekanan besar terhadap stabilitas sistem keuangan dunia. Kondisi ini menuntut seluruh institusi keuangan untuk tidak hanya tanggap secara operasional, tetapi juga mampu menunjukkan tata kelola yang kredibel dan dapat dipercaya. Dalam situasi seperti ini, transparansi anggaran memegang peran penting sebagai bentuk keterbukaan informasi yang memungkinkan publik dan regulator menilai kinerja serta integritas suatu lembaga.

Transparansi tidak dapat berdiri sendiri. Ia memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, di mana keterbukaan informasi menjadi landasan untuk mempertanggungjawabkan tindakan serta kebijakan yang telah diambil. Keduanya saling melengkapi: tanpa transparansi, akuntabilitas tidak akan berjalan efektif; sebaliknya, keterbukaan yang tidak disertai mekanisme pertanggungjawaban hanya akan menjadi formalitas administratif. Oleh karena itu, dalam sistem keuangan yang sehat, kedua prinsip ini harus berjalan berdampingan sebagai fondasi tata kelola yang kuat.

Pada lembaga keuangan syariah, prinsip transparansi dan akuntabilitas memperoleh makna yang lebih mendalam. Tidak hanya tunduk pada regulasi negara, lembaga ini juga terikat oleh nilai-nilai spiritual Islam seperti amanah (kepercayaan), 'adalah (keadilan), dan mas'uliyah (pertanggungjawaban). Prinsip-prinsip tersebut menuntut pengelolaan keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun kepada Tuhan. Dalam konteks ini, transparansi anggaran menjadi wujud nyata dari komitmen lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah, sekaligus sarana untuk membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Melalui kajian ini, penulis akan membahas peran transparansi anggaran sebagai pilar utama dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan lembaga syariah. Fokus pembahasan diarahkan pada bagaimana keterbukaan anggaran tidak hanya meningkatkan legitimasi lembaga di mata publik, tetapi juga memperkuat daya tahan kelembagaan dalam merespons berbagai dinamika dan ketidakpastian global yang terus berkembang.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode **tinjauan pustaka** (*literature review*) sebagai pendekatan utama dalam menganalisis topik transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan pada lembaga syariah. Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, seperti jurnal akademik, buku, regulasi, standar akuntansi syariah (khususnya PSAK No.101), serta laporan penelitian dan publikasi dari otoritas keuangan yang relevan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, berkontribusi terhadap ketahanan dan daya respons lembaga keuangan syariah dalam menghadapi ketidakpastian global. Analisis dilakukan dengan mengkaji temuan-temuan terdahulu yang berkaitan dengan implementasi transparansi keuangan, efektivitas pelaporan berbasis syariah, dan peran teknologi digital dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara transparansi anggaran dan akuntabilitas dalam konteks ekonomi syariah

yang berkelanjutan.

## **PEMBAHASAN**

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, lembaga keuangan syariah dituntut untuk tidak hanya mempertahankan stabilitas operasional, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi dasar sistem keuangan Islam. Dua aspek ini memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan publik serta memperkuat daya tahan lembaga terhadap tekanan eksternal. Oleh karena itu, pembahasan dalam bagian ini akan difokuskan pada dua hal utama, yaitu bagaimana transparansi berperan sebagai pilar akuntabilitas keuangan lembaga syariah, serta bagaimana lembaga tersebut merespons ketidakpastian global melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

### **A. Transparansi sebagai Pilar Akuntabilitas Keuangan Lembaga Syariah**

Transparansi merupakan landasan utama dalam menjaga akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi keuangan tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan amanah yang menjadi dasar operasional syariah. Pelaporan keuangan yang transparan memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk nasabah, investor, dan otoritas pengawas, untuk menilai sejauh mana sebuah lembaga menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonominya.

Lembaga syariah yang menerapkan Standar Akuntansi Syariah, seperti PSAK No.101, secara konsisten telah menunjukkan komitmen terhadap pelaporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. PSAK No.101 mengatur struktur, isi minimal, dan pengungkapan laporan keuangan syariah, termasuk di dalamnya kesepakatan akad, rincian dana, dan pembagian hasil. Penerapan standar ini bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga etis, karena bertujuan menjamin kejujuran dalam pencatatan transaksi serta perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat.

Yunita (2019) menekankan bahwa pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.101 berperan penting dalam memastikan transparansi, yang pada akhirnya mendukung akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan publik terhadap bank syariah. Penilaian publik terhadap kredibilitas sebuah lembaga sangat bergantung pada sejauh mana lembaga tersebut mampu menyediakan informasi yang jujur, relevan, dan mudah diakses. Dalam jangka panjang, transparansi yang konsisten akan memperkuat reputasi lembaga dan meningkatkan loyalitas para pemangku kepentingan.

### **Penerapan Transparansi di Lembaga Keuangan Syariah**

Penerapan transparansi dalam lembaga keuangan syariah, khususnya dalam produk pembiayaan seperti mudharabah, menempati posisi penting sebagai upaya menjamin pemahaman menyeluruh nasabah terhadap karakteristik produk yang mereka gunakan. Bank syariah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara utuh, meliputi nama dan jenis produk, tata cara penggunaan, manfaat serta risikonya, hingga metode perhitungan bagi hasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005

yang mewajibkan penyampaian informasi produk perbankan secara lengkap, jujur, dan tidak menyesatkan kepada nasabah.

Implementasi nyata dari prinsip ini dapat dilihat dalam praktik Bank Syariah Mandiri Cabang Kepanjen, yang menyampaikan perbedaan antara konsep mudharabah dan riba secara gamblang kepada calon nasabah. Tidak hanya menjelaskan definisi produk, bank juga menguraikan risiko yang mungkin timbul, beserta jangka waktu berlaku dan struktur keuntungan yang fleksibel berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa nasabah tidak hanya mengetahui sisi keuntungan, tetapi juga memahami potensi risiko dari pembiayaan tersebut (Aida et al., 2024).

Langkah-langkah transparan seperti ini tidak hanya menciptakan kesetaraan informasi antara bank dan nasabah, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang terhadap institusi. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah merasa puas terhadap pengungkapan manfaat produk dan sistem bagi hasil, namun masih ada ketidakpuasan terhadap pengungkapan risiko. Hal ini menandakan perlunya lembaga keuangan syariah untuk lebih terbuka, terutama dalam produk-produk kompleks berbasis akad seperti mudharabah dan musyarakah.

### **B. Respons terhadap Ketidakpastian Global**

Krisis ekonomi global telah memberikan dampak nyata terhadap sistem keuangan, termasuk ekonomi syariah. Dalam menghadapi kondisi pasar yang tidak stabil, lembaga keuangan syariah dihadapkan pada tantangan untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah sekaligus menyesuaikan diri dengan tekanan ekonomi yang terus berubah. Kondisi ini mendorong munculnya strategi adaptif dan inovasi produk yang tetap berlandaskan nilai-nilai islam. Meskipun masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, serta infrastruktur yang belum optimal, lembaga keuangan syariah mampu menunjukkan ketahanan (Handayani Siregar, Nurhayati, 2025). Peningkatan minat terhadap layanan keuangan syariah, baik dari masyarakat Muslim maupun non-Muslim, menunjukkan bahwa prinsip keuangan Islam semakin diterima secara luas. Inovasi berbasis teknologi turut memperkuat posisi ekonomi syariah dalam merespons krisis. Oleh karena itu, krisis global dapat menjadi pendorong transformasi dan pertumbuhan ekonomi syariah dalam skala yang lebih luas dan berkelanjutan (Gani, 2023).

Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, transparansi menjadi unsur penting dalam proses perencanaan dan pengendalian anggaran (Afrianto et al., 2024). Keterbukaan informasi anggaran memungkinkan lembaga keuangan, termasuk yang berbasis syariah, untuk menyusun strategi pengelolaan keuangan yang responsif dan berorientasi pada efisiensi penggunaan dana. Melalui transparansi, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka terhadap evaluasi dan partisipasi publik, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas lembaga. Transparansi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko, karena memungkinkan pemantauan dini terhadap potensi penyimpangan anggaran dan mendorong koreksi kebijakan secara cepat. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, transparansi tidak hanya dilihat sebagai tuntutan administratif, tetapi juga sebagai perwujudan nilai-nilai syariah seperti amanah dan keadilan. Oleh karena itu, keterbukaan anggaran merupakan bagian integral dari tata kelola yang baik dan penguatan kepercayaan stakeholder, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang tidak stabil (Sani & Firdaus, 2024).

Perkembangan teknologi digital memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Melalui penggunaan sistem keuangan berbasis digital, lembaga dapat menyediakan informasi secara terbuka dan waktu nyata (real-time), sehingga mempermudah pemantauan serta evaluasi oleh publik dan otoritas terkait. Teknologi juga mendukung proses audit dan pengawasan dengan lebih sistematis, sehingga memperkuat prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik, khususnya dalam konteks lembaga keuangan syariah (Ahmad & Santoso, 2025).

## **KESIMPULAN**

Transparansi anggaran terbukti menjadi fondasi utama dalam membangun akuntabilitas keuangan lembaga syariah yang tangguh. Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen spiritual dan etika dalam menjalankan prinsip Islam. Dalam menghadapi ketidakpastian global, transparansi berperan strategis dalam meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi kelembagaan, serta mendorong pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Penerapan standar akuntansi syariah seperti PSAK No.101 menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelaporan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, kemajuan teknologi digital memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih terbuka dan akurat. Oleh karena itu, keterbukaan anggaran tidak hanya menjawab tuntutan regulasi, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai keadilan dan amanah yang menjadi inti dari ekonomi Islam. Lembaga keuangan syariah yang mampu menjaga prinsip ini dengan konsisten akan lebih siap dalam menghadapi tantangan global dan membangun kepercayaan jangka panjang dari para pemangku kepentingan.

## **REFERENSI**

1. Afrianto, D., Sunardi, & Sisharini, N. (2024). JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi ). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(3), 38–51.
2. Ahmad, I., & Santoso, P. (2025). *Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan*. 3, 1–10.
3. Aida, I. N., Astuti, R. P., Barokah, M., Hermawan, M. R., Ekonomi, F., Islam, U., Haji, K., & Shiddiq, A. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Pembiayaan Bank Syariah*. 2, 552–559.
4. Gani, A. A. (2023). Pengaruh Krisis Ekonomi Global Terkini Terhadap Kepatuhan Dan Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Hukum Islam. *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 2023.
5. Handayani Siregar, Nurhayati, T. A. (2025). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(Edsus), 282–294. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.264>
6. Sani, D. R., & Firdaus, R. (2024). *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH: KAJIAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN SHARIA FINANCING : A STUDY BASED*

*ON SHARIA ACCOUNTING STANDARDS. November, 9044–9055.*

7. Yunita, N. A. (2019). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Syariah Psak No.101 Terhadap Pengelolaan Transaksi Keuangan Di Bank Syariah (Studi Pada Bank Bri Syariah Cabang Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 23.  
<https://doi.org/10.29103/jak.v7i1.1836>